

**ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA  
DI DESA BETELEME KECAMATAN LEMBO  
KABUPATEN MOROWALI UTARA**



Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi

Universitas Sintuwu Maroso

Oleh :  
Kristin Natalia Merisa Sinda  
91911404122016

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO  
POSO  
2023**

**Kristin Natalia Merisa Sinda**, nomor pokok mahasiswa **91911404122016** dengan judul “**Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Beteleme Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara**”, dibawah bimbingan **Sudarto Usuli** seagai pembimbing I dan **Tabita R. Matana** sebagai pembimbing II.

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelenggaraan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Beteleme Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara. Metodologi penelitian kualitatif deskriptif yang digunakan pada penelitian ini. Dengan melakukan wawancara anggota masyarakat, perangkat desa sebagai informan, penelitian ini dilaksanakan di Desa Beteleme Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Beteleme melakukan Proses Pengelolaan ADD yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Namun prosedurnya tidak ideal, hal ini terlihat dari lambatnya proses pelaporan dan pertanggungjawaban sehingga penyaluran dana tahap selanjutnya tertunda akibat hal tersebut.

*Kata Kunci : Pemerintah Desa, Pengelolaan, Alokasi Dana Desa (ADD)*



**Kristin Natalia Merisa Sinda**, NIM: 91911404122016. **Analysis of Village Fund Allocation Management (ADD) in Beteleme Village, Lembo Sub-District, North Morowali Regency"**, supervised by Sudarto Usuli and Tabita R. Matana.

### **ABSTRACT**

The purpose of this research is to find out how the Village Fund Allocation (ADD) is managed in Beteleme Village, Lembo Sub-District, North Morowali Regency. The research method used is descriptive qualitative. This research was conducted in Beteleme Village, Lembo Sub-District, North Morowali Regency, by conducting interviews and documentation with employees/staff and the community in Beteleme Village as informants.

The results of this study indicate that the ADD Management Process including Planning, Implementation, Administration, Reporting and Accountability is carried out by the Beteleme Village Government following the rules regulated by law. However, the process is not optimal. This can be seen from the reporting and accountability processes experiencing delays. This causes delays in disbursement of funds for the next stage.

**Keywords:** *Village Government, Management, Village Fund Allocation (ADD)*

## DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
HALAMAN SURAT PERNYATAAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II.....	6
TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR.....	6
2.1 Tinjauan Pustaka.....	6
2.1.1. Desa.....	6
2.2 Pengelolaan Keuangan Desa.....	6
2.3 Alokasi Dana Desa.....	8
2.4 Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Keuangan Desa.....	9
2.5 Penelitian Terdahulu.....	10
2.6 Kerangka Pikir.....	24
BAB III.....	26
METODOLOGI PENELITIAN.....	26
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian.....	26
3.2 Metode Penelitian.....	26
3.3 Data dan Sumber Data.....	26

3.4	Teknik Pengumpulan Data .....	27
3.5	Populasi dan Sampel .....	28
3.6	Teknik Analisis Data .....	28
3.7	Definisi Operasional .....	29
BAB IV .....		31
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....		31
4.1.	Hasil Penelitian.....	31
4.1.1	Gambaran Umum Objek .....	31
4.1.2	Visi Dan Misi Pemerintahan Desa Beteleme .....	32
4.1.3.	Relasi dan Fungsi BPD dengan Kepala Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa .....	33
4.1.4	Pengelolaan Alokasi Dana Desa.....	34
4.1.4.1	Perencanaan ADD .....	37
4.1.4.2	Pelaksanaan ADD.....	39
4.1.4.3	Penatausahaan ADD.....	41
4.1.4.4	Pelaporan ADD .....	42
4.1.4.5	Pertanggungjawaban ADD.....	44
4.2	Pembahasan .....	44
BAB V.....		47
KESIMPULAN DAN SARAN.....		47
5.1	Kesimpulan.....	47
5.2	Saran .....	47
DAFTAR PUSTAKA .....		49
LAMPIRAN .....		51
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS .....		55

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Mewujudkan kondisi desa yang ideal merupakan salah satu cita-cita setiap desa. Untuk mencapai hal tersebut, harus ada kerjasama antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten dalam pengelolaan keuangan desa. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa “kesatuan masyarakat hukum yang berbatasan dengan wilayah berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat...” Hal ini menunjukkan bahwa desa berwenang mengatur dan mengurus setiap komunitasnya secara terpisah. (Rudiarta et al., 2020)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa bahwa pemerintah desa diharapkan mampu meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan yang akan meningkatkan manfaat bagi masyarakat desa dari penyediaan barang dan jasa publik (Bhojaraju et al., 2005)

Tujuan dana desa antara lain meningkatkan pelayanan publik di desa, menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan ekonomi masyarakat, menghapus kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa memiliki kewenangan untuk menyalurkan dana desa secara bertahap yang

dianggarkan setiap tahun sebesar 10% dari APBN dan di luar dana transfer daerah. Dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan yang mengutamakan masyarakat setempat, keuangan desa diselenggarakan secara tertib, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, efektif, ekonomis, transparan, dan penuh tanggung jawab (Lembaran & Republik, 2014)

Ketika membahas uang dan keuangan, khususnya yang berkaitan dengan anggaran pemerintah, muncul beberapa isu. Akibatnya, desa yang terlambat menyampaikan laporan keuangannya atau menyalahgunakan uang desa dengan cara yang melawan hukum akan dikenakan sanksi. Tergantung pada masalah yang muncul, denda ini dapat berupa penundaan pembagian uang tunai atau pengurangan dana desa.

Pengelolaan keuangan ADD merupakan komponen penting dalam Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDes. Menurut Hidayana dan FPPD (2005), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) seringkali tidak seimbang karena empat alasan utama: 1) desa memiliki APBDesa yang terbatas dan sumber pendapatannya sangat bergantung pada bantuan yang sangat sedikit; 2) kesejahteraan masyarakat desa rendah; dan 3) dana operasional desa untuk pelayanan kurang memadai. 4) Tata kelola kotamadya semata-mata bertanggung jawab atas berbagai inisiatif pengembangan masyarakat.

Alokasi dana desa memfasilitasi kemampuan desa untuk secara mandiri membangun, mengembangkan, dan melaksanakan otonomi berdasarkan keragaman,

otonomi asli, partisipasi, demokrasi, pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Pemerintah federal mendukung kemajuan ADD.

Desa dapat membangun secara mandiri, menjalankan otonomi berdasarkan keragaman, otonomi asli, partisipasi, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat, serta alokasi dana daerah dapat memperkuat peran pemerintah desa dalam meningkatkan pelayanan masyarakat. Pemerintah federal memberikan bantuan untuk pembangunan ADD.

Beberapa investigasi sebelumnya menunjukkan bahwa sistem pengelolaan alokasi anggaran desa tampaknya berjalan sesuai dengan peraturan desa. Namun, terdapat keterlambatan pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa, dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan alokasi dana desa ditemukan kurang aktif.

Desa Beteleme merupakan desa di Kabupaten Lembo dengan kepadatan penduduk yang lebih tinggi dari tetangganya. Alokasi dana desa Desa Beteleme telah dikelola sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Desa Beteleme mengadakan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) dengan partisipasi perangkat desa dan lembaga masyarakat yang baru dibentuk untuk mengakomodasi usulan program kerja.

Di Desa Beteleme, masyarakat berpartisipasi dalam tahap pelaksanaan Alokasi Dana Desa dengan melakukan prakarsa yang dibiayai alokasi tersebut. Tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban telah diselesaikan sesuai ketentuan yang



berlaku. Menurut hasil wawancara, permasalahan pada tahap pelaporan menyebabkan terhambatnya penyaluran alokasi dana desa karena beberapa dinas terlambat memasukkan usulan yang dipersyaratkan, yang masuk dalam RAPBDes sehingga menyebabkan kabupaten terlambat memverifikasinya.

Berdasarkan penelitian terdahulu dan permasalahan yang ada di Desa Beteleme penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Beteleme Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas dapat dirumuskan masalah bagaimana pengelolaan alokasi dana desa di Desa Beteleme Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan alokasi dana desa di Desa Beteleme Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang akan dicapai dari hasil penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Kajian ini diharapkan dapat menjadi sumber pembelajaran sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Beteleme Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara.

2. Manfaat Praktek

- a. Bagi Penulis: Menambah pengetahuan dan pengalaman program pengelolaan alokasi dana desa melalui penelitian khusus.
- b. Untuk perangkat desa: dokumen ini dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan apa yang akan digunakan sebagai pedoman program pengelolaan alokasi dana desa.
- c. Untuk Mahasiswa: informasi mengenai administrasi alokasi dana desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bender, D. (2016). *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014*. ACM International Conference Proceeding Series, 18-April-2(1), 45–54. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Bhojaraju, G., Thamaria, N., & Al, U. et. (2005). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005*. Journal of Chemical Information and Modeling, 12 Suppl 1(9), 1–29. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049><http://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391><http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205><http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21918515><http://www.cabi.org/cabebooks/ebook/20083217094>
- Hadi, N. F. (2018). *Kebijakan pengelolaan keuangan desa dalam mewujudkan desa mandiri (Studi Kasus: Desa Punten, Kota Batu)*. Universitas Brawijaya Malang Fakultas Ekonomi Dan Bisnis.
- Islamy, I. (2014). *Definisi dan Makna Kebijakan Publik*. ADPU4410/Modul 1, 1–41.
- Lamandasa, S. R., & Ntada, S. (2022). *Analisis Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bulili Kecamatan Lore Selatan*. Jurnal Ekomen, 20(2), 27–38.
- Lembaran, T., & Republik, N. (2014). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari APBN*. Jurnal, 1–25. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5501>
- Noviyanti, & Mulyana. (2018). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Nahaaya Kecamatan Pesohilir Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara*. Je & Kp, 5(1), 73–88.
- Puspitasari, R., & Handayani, N. (2019). *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Desa Bulu, Kecamatan Purwosari, kabupaten Kediri)*. Ilmu Dan Riset Akuntansi, 10(4), 1–19. <http://www.albayan.ae>
- Ramdhani, F. I. (2018). *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara*. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis,

3(113), 1–22. <http://eprints.unm.ac.id/16345/1/JURNAL.pdf>

Rosalinda, O. (2014). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus : Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang)*. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Univeritas Brawijaya*, 1–14.

Rudiarta, I. K. G., Arthanaya, I. W., & Suryani, L. P. (2020). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemerintahan Desa*. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), 63–67. <https://doi.org/10.22225/ah.2.1.1619.63-67>

Ryan, Cooper, & Tauer. (2013). No Title No Title No Title. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents, 2012*, 12–26.

Undang-Undang No 32 Tahun 2004, T. P. D. (2004). *Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Dpr, 249*. <http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf>

Wibowo, Y. A. (2020). *Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. *Uniska Law Review*, 1(1), 38. <https://doi.org/10.32503/ulr.v1i1.189>

Yulinartatik, N. C., & Puspitasari, D. (2017). *Pengelolaan Keuangan Desa dalam Menunjang Pelaksanaan APBDES Progam Pembangunan Pada Desa Paleran Kecamatan Umbulsasi Kabupaten Jember*. <http://repository.unmuhjember.ac.id/250/>